

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
ATAS PENDAPATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. MERAPI
UTAMA PHARMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Tantry Suci Chairani
NPM : 1905170230
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

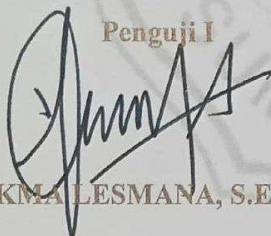
MEMUTUSKAN

Nama : TANTRY SUCI CHAIRANI
NPM : 1905170230
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I




(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.)

Penguji II



(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si.)

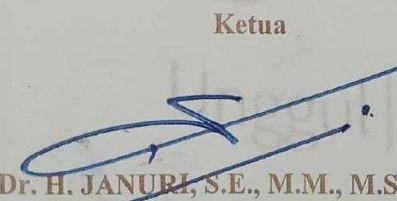
Pembimbing



(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

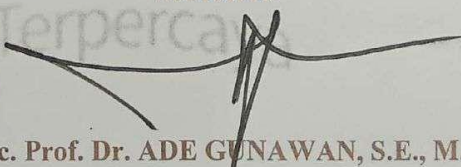
Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., C.A.A.)

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : TANTRY SUCI CHAIRANI
NPM : 1905170230
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
ATAS PENDAPATAN MENURUT UNDANG UNDANG
PERPAJAKAN PADA PT. MERAPI UTAMA PHARMA
MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, September 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si)

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMSU**






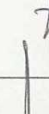

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M. Si)

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

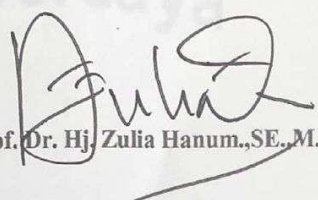
Nama Mahasiswa : TANTRY SUCI CHAIRANI
N P M : 1905170230
Dosen Pembimbing : KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL ATAS
PENDAPATAN MENURUT UNDANG UNDANG PERPAJAKAN PADA PT.
MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki identifikasi Masalah		
Bab 2	- Teori tentang Pendapatan akrual - Pendapatan berdasarkan SAK		
Bab 3	- Teknik Pengumpulan data diperbaiki - Daftar pustaka diperbaiki		
Bab 4	- Pembahasan harus menjawab rumus masalah - Tambahkan Ferri		
Bab 5	- Kesimpulan sesuai dgn masalah - amp 2 hal 57a		
Daftar Pustaka	- Mendeleuy		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Act dan selesai		

Medan, September 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tantry Suci Chairani
NPM : 1905170230
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Atas Pendapatan Menurut Undang Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2023
Yang menyatakan,



Tantry Suci Chairani
NPM. 1905170230

ABSTRAK

Tantry Suci Chairani. NPM : 1905170230 Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. Skripsi

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual atas pendapatan menurut undang-undang perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi berupa data laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI atas pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan Secara keseluruhan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku. Adanya laporan rekonsiliasi fiskal karena perbedaan antara pengakuan pendapatan dan biaya dalam akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya yaitu beda tetap dan beda waktu. Laporan rekonsiliasi fiskal terjadi karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Adanya perbedaan penghasilan kena pajak (PKP) disebabkan karena adanya biaya yang tidak diakui sebagai biaya dalam akuntansi menurut pajak tetapi diakui menurut akuntansi komersial, dimana biaya tersebut dapat memperkecil penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan..

Kata kunci : akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal

ABSTRACT

Chairani Suci Tantry. NPM : 1905170230. Analysis of the Application of Accrual-Based Accounting on Income according to the Tax Law at PT. Merapi Utama Pharma Medan. Thesis

The aim of writing this thesis is to determine the application of accrual-based accounting to income according to tax law at PT. Merapi Utama Pharma Medan. The analytical method used in this research is descriptive. Data analysis techniques in this study used descriptive analysis techniques. The data source used in this study is secondary data, namely data obtained from the company's written documents. The data collection method used in this study is the method of observation, interviews and documentation in the form of financial report data. Based on the results of research and discussion on the application of Accrual Based Accounting to income according to the Tax Law at PT. Merapi Utama Pharma Medan which is supported by the data obtained, the authors can draw conclusions Overall PT. Merapi Utama Pharma Medan has not implemented tax accounting in accordance with the rules and regulations regulated in the applicable tax law. There is a fiscal reconciliation report because of the difference between revenue and expense recognition in financial accounting and tax accounting. There are 2 types of fiscal reconciliation which are grouped based on their differences, namely fixed differences and time differences. The fiscal reconciliation report occurred due to positive fiscal corrections and negative fiscal corrections. The difference in taxable income (PKP) is caused by costs that are not recognized as costs in accounting according to tax but are recognized according to commercial accounting, where these costs can reduce the company's taxable income (PKP).

Keywords: accrual based accounting, fiscal reconciliation, fiscal correction

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karna itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya teruntuk yang teristimewah yaitu Alm. Ayahanda Irawan saleh dan Ibunda Yusmawati yang telah mengasuh, merawat dan mengajarkan banyak hal serta memberikan motivasi kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- 1.. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Ibu Assoc. Prof. Hj.Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si,Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan,SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berjasa dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, September 2023

Tantry Suci Chairani

NPM: 1905170230

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Basis Akuntansi.....	11
2.1.1.1. Akuntansi Berbasis Kas (<i>Cash Basis</i>).....	12
2.1.1.2. Akuntansi Berbasis Kas Modifikasi	13
2.1.1.3. Akuntansi Berbasis Akrual	14
2.1.1.4. Akuntansi Berbasis Akrual Modifikasi.....	15
2.1.2. Basis Akuntansi Akrual	16
2.1.2.1. Manfaat Basis Akuntansi Akrual	16
2.1.2.2. Pertentangan dalam Penggunaan Basis Akrual	19
2.1.2.3. Tantangan Penerapan Basis Akrual pada Pemerintah Indonesia.....	23
2.1.3. Akuntansi Perpajakan	28
2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Perpajakan	28
2.1.3.2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan.....	30
2.1.3.3. Prinsip Akuntansi Perpajakan	36
2.1.4. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan	37
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Definisi Operasional	45
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Teknik Analisis Data	48

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Hasil Penelitian	50
4.1.1. Sejarah Singkat PT. Merapi Utama Pharma	50
4.1.2. Visi dan Misi PT. Merapi Utama Pharma.....	51
4.1.3. Peran dan Fungsi PT. Merapi Utama Pharma.....	52
4.1.4. Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma Medan	52
4.1.5. Personalia dan Ketenagakerjaan	53
4.2. Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma	56
4.2.1. Mekanisme Pencatatan Pendapatan Pajak Berbasis Akrua.....	55
4.2.2. Rekonsiliasi Fiskal	56
4.3..Pembahasan	60
 BAB 5 PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	66
5.3. Keterbatasan Penelitian	67
 DAFTAR PUSTAKA	69
 LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Realisasi dan Target Penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan	6
Tabel 1.2.	Data Komitmen Kerja Sama Dan Bentuk Penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan	7
Tabel 3.1.	Rencana Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 4.1.	Jumlah karyawan PT. Merapi Utama Pharma Cabang Medan.	54
Tabel 4.2.	Perhitungan Laba Rugi Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan).....	56
Tabel 4.3.	Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan).....	57
Tabel 4.4.	Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan).....	62
Tabel 4.5.	Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan).....	63
Tabel 4.6.	Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan).....	65
Tabel 4.7.	Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual	44
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen yaitu Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan layak apabila dapat dipahami, relevan, reliabilitas, komparabilitas serta konsisten. Pada umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai catatan atas laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut diharuskan untuk dilaporkan secara wajar yang bisa memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pemilihan metode, teknik serta kebijakan–kebijakan akuntansi, pemilihan metode maupun teknik dalam akuntansi dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan. Dalam menyusun laporan keuangan yang wajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya komponen laporan keuangan yaitu laporan laba rugi (Lumingkewas, 2013).

Laporan laba rugi merupakan gambaran sekilas mengenai perkembangan usaha melalui informasi keuangan yang diperoleh dari tingkat pencapaian keuntungan maupun kerugian suatu entitas. Unsur-unsur utama laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Secara ringkas dapat diketahui bahwa yang

dimaksud pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Dan, yang dimaksud dengan beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. (Hery, 2012).

Dalam perihal perpajakan, pendapatan perpajakan merupakan komponen penyumbang pendapatan yang memiliki porsi terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Republik Indonesia. Berdasarkan alasan inilah implementasi tentang kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi pendapatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Pendapatan perpajakan di Indonesia meliputi Pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akruak yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke rekening negara. Penerapan basis kas ini memudahkan pencatatan dan pelaporan pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak fiskal tertentu tanpa memperhatikan kapan sebenarnya pendapatan tersebut

dihasilkan. Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapatan yang dilaporkan menjadi kurang merepresentasikan keadaan sebenarnya sehingga pelaporannya menjadi kurang andal dan akuntabel.

Dalam Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP berbasis akrual dengan batas waktu empat tahun sejak tanggal ditetapkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penerapan basis akrual terdiri atas langkah teknis dan praktis. Langkah teknis berupa melakukan proyeksi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas ke dalam pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional yang berbasis akrual. Untuk melakukan proyeksi pendapatan perpajakan dalam Laporan Operasional dilakukan melalui pos penampung estimasi pajak yang secara potensial akan diterima. Pos penampung tersebut adalah piutang pajak. Sedangkan langkah praktik ditempuh dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam lingkungan pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan SAP berbasis akrual, khususnya dalam akuntansi pendapatan perpajakan tidaklah mudah karena terkendala oleh penerapan *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kendala lain yang mungkin muncul yaitu sulitnya melakukan estimasi pendapatan pajak yang akurat. Estimasi pendapatan pajak ini akan

berhubungan dengan cara pemungutan pajak di Indonesia yang menganut stelsel campuran (gabungan stelsel fiktif dan stelsel nyata). Keberadaan stelsel fiktif yang digunakan sebagai salah satu cara pemungutan pajak akan membutuhkan adanya estimasi terhadap pendapatan perpajakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi juga merupakan kendala dalam menerapkan basis akrual tersebut. Oleh karena itu penerapan dinegara berkembang, dalam konteks ini Indonesia, harus direncanakan secara praktis dan realistis sesuai dengan SDM dan kapasitas yang tersedia.

PT. Merapi Utama Pharma Medan termasuk pedagang besar Farmasi yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, cairan infuse dan peralatanya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut prinsipal ke rumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini market. PT. Merapi Utama Pharma Medan yang berlokasi di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138.

Dalam praktek operasionalnya PT. Merapi Utama Pharma Medan tidak merasa kesulitan dalam mengukur dan mengakui pendapatan perusahaan. Namun dari survey awal yang dilakukan, laporan keuangan yang dicatat oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan masih belum memenuhi standar akuntansi berlaku umum. Akuntansi berlaku umum tentang pendapatan mengungkapkan bahwa pendapatan merupakan aliran dana atau aset yang masuk (aktiva). Dalam prinsip ini setiap pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan umumnya ketika terjadi aktivitas usaha misalnya penjualan barang atau jasa tertentu. Sementara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sebagian besar pengguna standar saat ini melihat pengakuan pendapatan pada saat hak pemerintah timbul. Namun demikian, dalam SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) tidak dijelaskan kapan hak pemerintah timbul. Pemerintah menggunakan kriteria yang terdapat dalam Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan untuk mengakui pendapatan pajak. Dalam Buletin Teknis tersebut terdapat 3 metode pengakuan pendapatan perpajakan yang didasarkan pada metode pemungutan perpajakan yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Pemerintah Indonesia telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan transaksi sejak tahun 2010, pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa melihat kapan diterima atau dikeluarkannya kas.

PT. Merapi Utama Pharma Medan melakukan pencatatan pendapatan secara sederhana atas nilai transaksi yang dilakukan setiap harinya. Lalu kemudian membuat rekapitulasi tahunan dari seluruh catatan transaksi harian tersebut di akhir tahun.

Disamping itu dalam mendistribusikan produk-produknya, PT. Merapi Utama Pharma Medan menggunakan saluran distribusi tidak langsung ke pelanggan-pelanggannya yaitu apotik, rumah sakit, dan toko obat. Data

realisasi dan target penjualan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan dari tahun 2018-2022.

Tabel 1.1. Data Realisasi dan Target Penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan.

Tahun	Volume Penjualan (Jutaan Rp)		Persentasi Pencapaian
	Realisasi	Target	
2018	280.816	290.506	97,63%
2019	310.124	330.120	94,81%
2020	390.336	360.110	108,83%
2021	430.322	580.195	74,44%
2022	450.702	680.795	66,43%

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan (2023)

Dari data diatas dapat dilihat secara keseluruhan realisasi dan target penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan dari tahun 2018-2022 hanya tahun 2020 yang melampaui target peningkatan penjualan yaitu 108,83%. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah realisasi dan target penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan bahkan tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 cenderung tidak tercapai.

Data lain berkaitan kesepakatan kerjasama dilakukan oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan para penyalurnya, khususnya pihak apotik dan toko obat. Kesepakatan kerja sama kedua belah pihak bertujuan mendorong program-program saluran distribusi agar sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Berikut ini tabel 1.2 memberikan gambaran upaya PT. Merapi Utama Pharma Medan membangun komitmen kerjasama dengan penyalurnya.

Tabel 1.2. Data Komitmen Kerja Sama Dan Bentuk Penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan

Tahun	Apotik			Toko Obat		
	Jumlah Komitmen	Penjualan Cash	Penjualan Kredit	Jumlah Komitmen	Penjualan Cash	Penjualan Kredit
2018	27	9%	91%	13	10%	90%
2019	14	10%	90%	10	12%	88%
2020	32	6%	94%	24	14%	86%
2021	27	5%	95%	29	9%	91%
2022	19	11%	89%	11	15%	85%

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan (2023)

Data Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019-2020 terdapat kenaikan jumlah komitmen kerjasama antara PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan pihak apotik dan terjadi kenaikan jumlah persentase penjualan kredit. Sebagian besar penjualan dengan pihak apotik dan toko obat merupakan penjualan kredit dan hanya sebagian kecil penjualan dalam bentuk cash. Tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah penjualan cash sebesar 11% untuk pihak apotik dan 15% untuk pihak toko obat.

Permasalahan yang terjadi di PT. Merapi Utama Pharma Medan dalam akuntansi adalah penjualan kredit kas dalam pengakuan pendapatan setelah ada pembayaran sebagian atau seluruhnya dari pelanggan. Penyusunan laporan keuangan masih bersifat sederhana karena merupakan kantor cabang. Kantor pusat berada di Jl. Cilosari no. 25, Cikini, Jakarta. Dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan di laporan keuangan, PT. Merapi Utama Pharma Medan belum bisa menerapkan apakah berdasarkan kas basis atau accrual basis. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Disamping itu, permasalahan yang terjadi

di PT. Merapi Utama Pharma Medan menunjukkan penyajian laporan keuangan sering tidak konsisten.

Penjualan diakui sebagai pendapatan setelah pelanggan membayar penuh atas skala dari faktor pajak. Di dalam basis akrual sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan.

Disamping itu, perusahaan tidak memiliki *adjustment* jurnal penjualan atas pendapatan yang harus diterima sehingga laporan keuangan yang disajikan kurang akurat, karena ada saldo-saldo akun akhir periode yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jurnal penyesuaian (*adjustment*) ini penting untuk mengkinikan (*update*) saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis memilih topik untuk penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dirumuskan identifikasi masalah guna memudahkan pembahasan penelitian tersebut. Identifikasi masalah antara lain:

- a. PT. Merapi Utama Pharma Medan dalam menghitung pendapatan masih berdasarkan kas basis.
- b. Penjualan diakui sebagai pendapatan setelah pelanggan membayar sebagian atau seluruhnya dari faktur penjualan.
- c. PT. Merapi Utama Pharma Medan tidak melakukan adjustment jurnal pada akun pendapatan yang harus diterima.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
“Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual atas pendapatan menurut undang-undang perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut undang-undang perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut perihal perpajakan serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan praktik dilapangan.
- b. Sebagai memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut perihal perpajakan.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut perihal perpajakan pada suatu perusahaan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Basis Akuntansi

Menurut Mustofa (2008) basis akuntansi menyangkut dengan prinsip-prinsip akuntansi terkait penentuan kapan pengaruh transaksi atau kejadian diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Amalia, Radistya, & Murti (2014) basis akuntansi sebagai salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan kapan periode pengakuan, pengukuran dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan.

Umumnya basis akuntansi terbagi dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun masih terdapat modifikasi keduanya, yaitu akuntansi berbasis kas modifikasi dan akuntansi berbasis akrual modifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa basis akuntansi terdiri atas 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas;
2. Akuntansi berbasis kas modifikasi;
3. Akuntansi berbasis akrual;
4. Akuntansi berbasis akrual modifikasi.

Selain keempat basis akuntansi tersebut, terdapat basis akuntansi Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual/CTA*) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Rama & Jones (2018) menyatakan bahwa pengelompokan basis pencatatan akuntansi tersebut bukan hal mutlak.

International Monetary Fund (IMF) yang menerbitkan *Government Financial Statistic* (GFS) membagi basis akuntansi menjadi 4 jenis yaitu basis akrual, basis kas, *due-for-payment basis* dan *commitments basis* (Rama & Jones, 2018).

2.1.1.1. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Basis*)

Pada basis ini transaksi dan peristiwa ekonomi diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan (Mustofa, 2008). Basis kas dapat menyajikan informasi sumber dana dan penggunaan dana selama satu periode serta saldo kas pertanggal pelaporan. Komponen laporan keuangan pada basis kas yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk menyajikan secara detail informasi-informasi terkait item-item laporan keuangan serta informasi lainnya yang perlu diungkapkan.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Indonesia menggunakan basis kas. Pendapatan dan belanja diakui ketika kas masuk atau keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D). Demikian juga dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, diakui dan dicatat apabila terjadi kas masuk atau keluar dari RKUN/D. Sedangkan terkait dengan Dana Cadangan diakui ketika dilakukan penyesuaian uang sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan. Berkurangnya Dana Cadangan apabila dilakukan pencairan Dana Cadangan.

Terdapat keterbatasan dan kelebihan akuntansi berbasis kas. Keterbatasan akuntansi berbasis kas di antaranya yaitu tidak terdapat pencatatan secara *double entry* sehingga laporan posisi keuangan (Neraca) tidak dapat disajikan, hanya fokus pada arus kas dan dampaknya pada periode berjalan. Adapun kelebihan akuntansi berbasis kas di antaranya adalah memperlihatkan sumber dana serta mudah dimengerti dan dijelaskan.

2.1.1.2. Akuntansi Berbasis Kas Modifikasi

Sesuai dengan namanya, maka basis ini merupakan modifikasi dari basis kas. Perbedaannya terletak pada periode pembukuannya yang masih harus ditambah beberapa waktu atau periode tertentu untuk pembukuan periode berjalan, umumnya 1 atau 2 bulan setelah akhir periode berjalan. Dalam basis ini, perlu dilakukan penambahan dan pengurangan penerimaan dan pengeluaran kas periode berjalan yang diakibatkan oleh transaksi periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam basis kas modifikasi, yaitu:

1. Fokus pengukuran yaitu atas sumber keuangan sekarang serta berbagai perubahan atas sumber keuangan tersebut. Karena adanya perbedaan pada kebijakan periode pencatatan dengan basis kas yaitu penambahan waktu pengakuan dan pengukuran, maka memunculkan dampak pada informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
2. Penentuan periode tersebut bervariasi pada berbagai pemerintah, namun secara umum memenuhi persyaratan berikut: harus diterapkan secara konsisten di setiap periode, berlaku menyeluruh baik untuk penerimaan maupun pengeluaran/belanja, secara umum penambahan periode adalah satu bulan dalam rangka memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diungkapkan secara lengkap (*full disclosure*).

Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu yaitu bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa negara menganggap bahwa seluruh

penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan negara yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.

2.1.1.3. Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut IPSAS dalam Triharta (2013) definisi basis akrual adalah:

“A basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses.”

Penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. Pemerintah dapat mengetahui kualitas kinerja organisasi dari sisi efisiensi belanja negara dan capaian target pendapatan, baik pendapatan pajak maupun PNBPN. Pemerintah juga dapat melihat posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan yang disusun berbasis akrual juga dapat memberikan informasi bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan pendanaan atas aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya sehingga pemerintah dapat membuat keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pihak eksternal dapat mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efisiensi biaya pelayanan serta penyampaian pelayanan (Mustofa, 2008).

Basis akrual untuk Neraca artinya seluruh komposisi Neraca diakui dan dicatat ketika terjadinya transaksi atau ketika adanya kejadian/kondisi lingkungan

yang berpengaruh terhadap keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan aliran masuk/keluar kas setara kas.

Kelompok-kelompok akun di Neraca secara garis besar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, piutang jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya yang merupakan kelompok aset (bersaldo normal debit). Sedangkan pada kelompok kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta ekuitas yang bersaldo normal kredit.

Penyesuaian-penyesuaian akun Neraca dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian-penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas persediaan, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, serta pendapatan diterima di muka. Penyesuaian-penyesuaian tersebut selain mempengaruhi posisi Neraca juga mempengaruhi Laporan Operasional.

2.1.1.4. Akuntansi Berbasis Akrual Modifikasi

Pada basis ini, tidak semua akun-akun aktiva maupun kewajiban diakui dalam laporan keuangan. Salah satu contoh penerapan akuntansi berbasis akrual modifikasi yaitu pengakuan aktiva dan kewajiban menggunakan basis akrual sedangkan atas pendapatan menggunakan basis kas atau modifikasi basis kas.

Granof & Khumawala (2013) menjelaskan bahwa fokus pengukuran pada basis akrual modifikasi yaitu pada *current financial resources*. Definisi *current financial resources* yaitu sebagaimana dikutip berikut ini:

“Current financial resources has been interpreted to mean “expendable financial resources” cash and other items that can expected to be transformed into cash in the normal course of operations (less current liabilities). The “other items” include investments and receivables but not capital assets.”

Governmental Accounting Standard Board (GASB) merupakan salah satu penyusun standar yang telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual modifikasi. *GASB Statement 33* dalam Granof & Khumawala (2013) menjelaskan syarat pengakuan pendapatan sebagaimana dikutip berikut ini:

“They cannot recognize until they are both measurable and available to finance expenditures of the fiscal period.”

Di antara negara-negara yang menerapkan akuntansi berbasis akrual modifikasi adalah Kanada dan Pemerintah Federal Amerika Serikat. Pemerintah Kanada mengakui pendapatan pada periode ketika peristiwa atau transaksi telah terjadi dan pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Sedangkan pada Pemerintah Federal Amerika Serikat (*State*) pendapatan pajak diakui dalam periode akuntansi saat pendapatan tersebut terukur (*measurable*) dan tersedia (*available*) untuk mendanai pengeluaran. *Available* adalah pendapatan pajak dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

2.1.2. Basis Akuntansi Akrual

2.1.2.1. Manfaat Basis Akuntansi Akrual

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas untuk sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan ini hanya dapat dicapai sepenuhnya dengan menerapkan akuntansi akrual. Akun-akun akrual memberikan pandangan yang komprehensif dari aset dan kewajiban suatu pemerintah, kinerja,

dan *cash flow* untuk periode laporan tersebut. standar akuntansi akrual mencerminkan dampak ekonomi jangka panjang dari keputusan politik dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi kas tidak mungkin melakukan hal ini (Price Waterhouse Cooper, 2013).

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat dan dilaporkan ketika terjadi, terlepas dari kapan transaksi kas terjadi. International Federation of Accountants (2011) dalam *Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities* mengatakan akuntansi akrual memberikan informasi tentang posisi keuangan secara keseluruhan dan ketersediaan atas aset dan kewajiban sebuah entitas. Entitas sektor publik memerlukan informasi tersebut untuk:

1. Menunjukkan akuntabilitas kepada publik untuk manajemen aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan;
2. Rencana kebutuhan dana di masa depan terhadap pemeliharaan dan penggantian aset;
3. Rencana pelunasan atau pembayaran kewajiban yang ada; dan
4. Membuat keputusan tentang tingkat aset dan hutang yang dimiliki dalam konteks pembiayaan layanan yang ingin diberikan.

International Federation of Accountants (2011) melanjutkan dengan menyatakan bahwa basis akuntansi akrual memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran, termasuk dampak dari transaksi di mana kas belum diterima atau dibayar. Informasi yang akurat tentang pendapatan sangat penting

untuk menilai dampak perpajakan dan pendapatan lain pada posisi fiskal pemerintah.

Informasi tentang pendapatan membantu baik pengguna dan entitas sektor publik sendiri untuk menilai apakah pendapatan saat ini cukup untuk menutupi biaya program dan layanan saat ini. Basis akuntansi akrual juga memberikan informasi yang lebih baik daripada akuntansi kas terhadap biaya aktual jasa tertentu yang disampaikan oleh entitas dan apakah sumber arus dana yang cukup untuk mempertahankan tingkat pelayanan.

Wynne (2007) meringkas keuntungan dari Basis Akrual sebagai berikut:

1. Basis akrual menghadirkan informasi yang lebih banyak daripada basis kas dan memiliki fokus yang lebih besar pada output bukan hanya input.
2. Informasi yang tersedia dari basis akrual memfasilitasi kualitas yang lebih baik terhadap manajemen dan pengambilan keputusan, termasuk dalam kasus alokasi sumber daya.
3. Menyediakan perbandingan yang lebih mendalam dari hasil kinerja manajemen yang tidak terpengaruh oleh waktu pembayaran tunai dan juga meliputi informasi tentang aset lancar, aset tetap, dan kewajiban.

IMF menyatakan bahwa memisahkan transaksi berjalan maupun transaksi modal berguna untuk menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan fiskal. Dengan memberikan informasi mengenai depresiasi dan penilaian perubahan aset, informasi akrual memungkinkan penilaian yang lebih baik pada kualitas investasi pemerintah dan kesinambungan kebijakan fiskal (Athukorala & Reid, 2003).

Menurut IMF, basis akrual adalah basis yang menunjukkan akuntabilitas

pemerintah. Hal tersebut dikarenakan basis akrual lebih komprehensif dalam mencatat semua aliran sumber daya, termasuk transaksi internal, transaksi sejenis dan arus ekonomi lainnya. Pencatatan yang luas ini memungkinkan integrasi arus dengan perubahan dalam neraca. Dalam kasus apapun, laporan akrual juga menyediakan laporan arus kas. Sebaliknya, basis kas biasanya tidak membedakan antara biaya dan akuisisi dari aset non finansial (seperti bangunan). Dengan metode akrual, akuisisi dari aset non finansial dicatat secara terpisah (Athukorala & Reid, 2003).

2.1.2.2. Pertentangan dalam Penggunaan Basis Akrual

Akuntansi akrual, sementara dapat dikatakan berhasil dilaksanakan di negara maju, belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi dari banyak negara berkembang. Meskipun berbagai upaya telah oleh beberapa negara. Hal ini diakui oleh Komite Sektor Publik IFAC bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan kecepatan migrasi ke akuntansi akrual meliputi:

1. Sistem pemerintahan dan lingkungan politik bangsa
2. Apakah reformasi berfokus hanya pada mengubah kerangka pelaporan atau meliputi reformasi skala yang lebih luas lainnya
3. Apakah perubahan sedang didorong dari "top down" atau "bottom up"
4. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas saat ini, kemampuan sistem informasi yang ada, dan kelengkapan dan keakuratan dari informasi yang ada, terutama dalam kaitannya dengan aset dan kewajiban
5. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran
6. Tingkat komitmen politik untuk mengadopsi akuntansi akrual, dan

7. Kapasitas dan keterampilan orang-orang dan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan (Tickell, 2010).

Selain itu, OECD mencatat bahwa:

“The introduction of accrual accounting implies a requirement for substantial investment in management information systems in order to support ex-ante budgeting requirements and to support improved management practices. It requires a cultural change by managers within departments and agencies through an understanding and acceptance of how to use the additional information and of the potential benefits which it produces, and a commitment to change.”

Lebih luas lagi, OECD mengatakan bahwa akuntansi berbasis akrual membutuhkan investasi dan dukungan yang besar agar tujuan untuk memperbaiki manajemen keuangan publik dapat sepenuhnya terlaksana. Investasi dan dukungan tersebut juga harus berupa komitmen besar dari semua pelaku dan kesiapan untuk melakukan perubahan besar. Hal ini yang menurut OECD perlu dipertimbangkan bagi pemerintah yang ingin beralih ke basis akrual.

Wynne (2007) menyatakan bahwa kelemahan utama berpindah ke akuntansi berbasis akrual adalah biaya yang akan terjadi dan tingkat kompleksitas laporan keuangan yang dihasilkan. IFAC melalui Komite Sektor Publik telah merangkum biaya yang akan terjadi dalam memperkenalkan basis akrual dalam kategori berikut:

1. Mengidentifikasi dan menilai aset yang ada
2. Mengembangkan kebijakan akuntansi
3. Membangun sistem akuntansi, termasuk pembelian sistem komputer dan pengujian piloting system
4. Mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan memberikan pelatihan baik bagi penyusun maupun pengguna informasi keuangan.

Semua hal memiliki sisi baik dan buruk yang dapat diperdebatkan. Begitu pula basis akuntansi akrual. Bagi sektor swasta, basis akrual diyakini merupakan cara untuk mengukur operasional perusahaan dan menilai kekayaan perusahaan. Berbeda bagi sektor pemerintah, basis akrual adalah sebuah hal baru yang cukup rumit untuk diimplementasikan dalam sistem perekonomian, proses bisnis, maupun budaya pemerintahan suatu negara.

Basis akrual diyakini dapat memberikan informasi yang sangat relevan dan membantu dalam menilai kondisi finansial sebuah negara. Walau dengan keuntungan tersebut, banyak argumen yang tidak mendukung berlakunya implementasi akrual dalam sektor pemerintah.

Hassan (2013) merangkum argumen-argumen yang mengkritisi penggunaan basis akrual dalam sektor pemerintahan. Argumen tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 tingkatan: tingkat teoritis dan tingkat implementasi. Berikut adalah argumen pada tingkat teoritis:

1. Sifat sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Kegiatan di sektor publik tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba, dengan demikian, sistem akuntansi yang terutama ditujukan untuk mengukur laba tidak tepat diterapkan di sektor publik.
2. Prinsip matching cost against revenue tidak berlaku di sektor publik. Hal ini karena sebagian besar transaksi di sektor publik adalah transaksi non exchange yang berarti bahwa pendapatan yang diterima (misalnya dari pajak) tidak memberikan nilai yang sama dalam layanan yang disediakan (misal untuk membangun infrastruktur).

3. Aset dalam pemerintahan melingkupi hal-hal yang lebih luas daripada yang dimiliki sektor swasta. Aset ini, termasuk infrastruktur, militer dan aset warisan, terutama tidak digunakan untuk menghasilkan laba. Selain itu, karena sifat aset tersebut adalah unik dibandingkan dengan yang ada di sektor swasta, penilaian dan keputusan dan metode yang digunakan untuk depresiasi aset yang bisa diperdebatkan.
4. Perubahan akuntansi akrual selalu terhubung dengan reformasi sektor publik lainnya sehingga harus dilihat sebagai bagian retorika reformasi.

Pada tingkat implementasi, argumen yang diperdebatkan adalah berikut:

1. Penerapan dan implementasi yang sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi akrual membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit. Selain itu, kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang dapat mengelola sistem.
2. Berbeda dengan klaim NPM, dengan menerapkan akuntansi akrual, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintah menjadi kurang jelas.
3. Pelaksanaan akuntansi akrual di sejumlah sektor publik telah menghasilkan laporan keuangan membingungkan.
4. Manipulasi tidak berkurang, akuntansi akrual di sektor publik adalah sama seperti sistem akuntansi lainnya yaitu rawan untuk dimanipulasi. Argumen ini menyetujui klaim bahwa sistem tertentu dari akuntansi menawarkan transparansi yang lebih besar.
5. Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual mungkin telah melebihi manfaat.

Di Indonesia, penerapan basis akrual baru memasuki tahun pertama. Penerapan basis akrual di Indonesia sejatinya adalah pengimplementasian amanat undang-undang keuangan negara. Namun memang terkait implementasi basis akuntansi akrual ini menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan tengah mengembangkan sistem yang mengakomodasi basis akuntansi akrual yang dinamakan SPAN dan SAKTI.

Aplikasi SAKTI sendiri masih dalam tahap piloting yang saat ini tugasnya diambil oleh Aplikasi SAIBA dalam membantu pelaporan keuangan yang pada niatannya akan dilakukan oleh Aplikasi SAKTI. Dalam mengembangkan Sistem Akuntansi ini, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, namun sayangnya belum dapat diukur manfaatnya mengingat Tahun 2015 masih merupakan tahun pertama penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

2.1.2.3. Tantangan Penerapan Basis Akrual pada Pemerintah Indonesia

Menurut Tickell (2010), akuntansi akrual, sementara bisa dibilang berhasil dilaksanakan di negara maju, namun belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi di banyak negara berkembang. Hal Ini telah diakui oleh Komite Sektor Publik IFAC bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan kecepatan migrasi ke akuntansi akrual meliputi:

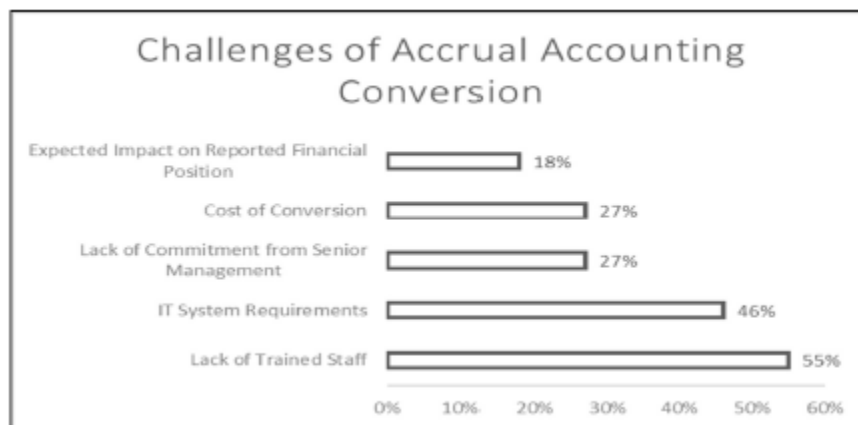
1. Sistem pemerintahan dan lingkungan politik negara
2. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas, kemampuan sistem informasi yang ada, dan kelengkapan dan keakuratan dari informasi yang ada, terutama dalam kaitannya dengan aset dan kewajiban
3. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran
4. Tingkat komitmen politik untuk adopsi akuntansi akrual, dan

5. Kapasitas dan keterampilan orang-orang dan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan.

PWC pada tahun 2013 melakukan survei yang menganalisis aspek-aspek kunci dari akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah selama 12 bulan terhadap 140 Negara mencakup semua wilayah geografis dan semua tingkat perkembangan. Survei berakhir di bulan Maret 2013 dan PWC lalu menerbitkan laporan hasil survei yang berjudul *Towards a New Era in Government Accounting and Reporting* pada Bulan April 2013. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa konversi ke akuntansi akrual membutuhkan komitmen yang signifikan terhadap sumber daya dalam hal waktu, tenaga, dan uang.

Hal ini juga menuntut keterampilan khusus dan pergeseran total dalam pola pikir orang-orang di semua tingkatan organisasi. Sistem Teknologi Informasi perlu ditingkatkan atau sistem baru agar dapat dirancang untuk mendukung perubahan. Komitmen dari manajemen senior dan politisi sangat penting untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan dan mempromosikannya dalam internal pemerintahan.

Survei yang dilakukan PWC tersebut juga memberikan gambaran akan tantangan yang akan dihadapi saat melakukan konversi ke akuntansi akrual seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: PwC Global survey on accounting and reporting by central governments

Berdasarkan gambar diatas terdapat lima tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan:

a. Kurangnya Staf yang terlatih

Akuntansi akrual lebih kompleks daripada akuntansi kas. Hal ini membutuhkan keahlian teknis akuntansi yang lebih besar, peningkatan professional judgement, dan keterlibatan yang lebih besar dari staf non akuntansi dalam proses pengambilan keputusan. Lebih dari setengah responden survei mengidentifikasi kurangnya staf yang terlatih sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah ketika menerapkan akuntansi akrual. Keahlian yang dibutuhkan tidak terbatas untuk memahami konsep-konsep akrual dasar; pengetahuan teknis yang diperlukan untuk area akuntansi yang kompleks seperti instrumen keuangan, imbalan kerja, penilaian properti dan konsolidasi, tersebut hanya beberapa contoh. Pelatihan staf juga diperlukan pada tingkat operasional di bidang-bidang seperti manajemen aset tetap dan persediaan.

Hal ini juga dialami di pemerintahan Indonesia, dapat terlihat dari kurangnya tenaga akuntan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah.

Sistem rekrutmen PNS yang tidak terlalu mempermasalahkan jurusan pendidikan terutama pada saat penempatan, menjadi sebuah kendala tersendiri karena harus membuat pelatihan terkait akuntansi terhadap staf di bagian keuangan pada instansi pemerintah.

b. Sistem Teknologi Informasi

Banyak pemerintahan yang mengakui bahwa sistem teknologi informasi yang tepat perlu untuk mencatat dan melaporkan data yang diperlukan untuk akuntansi akrual (misalnya menambahkan rincian barang dan jasa yang diterima di alur kerja akun beban, mengembangkan cara-cara baru pelaporan dan mengkomunikasikan informasi keuangan, dll). Keahlian teknis teknologi informasi dan perencanaan sumber daya organisasi diperlukan dari awal proses konversi, seperti dalam kegiatan seperti arsitektur sistem dan desain, melalui kegiatan terintegrasi termasuk pelatihan staf untuk entri data dan manajemen.

Ruang lingkup entitas pelaporan pemerintah harus dipertimbangkan ketika merancang solusi teknologi informasi untuk semua entitas konsolidasi dan beberapa fungsi keuangan termasuk pengadaan, penganggaran, akuntansi dan perbendaharaan.

Awal pelaksanaan bisa dilakukan dengan sistem piloting dengan pertimbangan di masa depan terhadap sistem lokal yang dapat diintegrasikan. Banyak entitas sektor publik menggunakan adopsi akrual mereka sebagai kesempatan untuk mendirikan sebuah sistem terintegrasi dan meningkatkan fungsi keuangan mereka dengan fungsi baru seperti akuntansi biaya dan anggaran.

Sistem teknologi informasi harus dikonfigurasi sehingga dapat menangkap semua input data yang diperlukan dalam rangka menghasilkan output yang diperlukan (yaitu laporan berbasis akrual). Di area aset tetap, misalnya, sistem dan proses harus di tempat untuk menangkap informasi melalui perimeter sangat besar dan menyelesaikan masalah teknis yang rumit. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin memiliki aset terdaftar tetapi informasi yang tersedia tidak selalu lengkap dan perangkat lunak tidak dirancang dari awal untuk terintegrasi dengan data akrual yang diperlukan.

Perlu komitmen kuat dari Kementerian Keuangan sebagai pembangun standar, terkait pengembangan sistem teknologi informasi keuangan ini. Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini tengah mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi yang dinamakan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi) dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

c. Kurangnya Komitmen dari Pimpinan dan Politisi

Komitmen yang kuat dari manajemen senior dan politisi penting untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan utama dan mempromosikan manfaat akuntansi akrual kepada seluruh organisasi. Konversi ke akuntansi akrual mencakup banyak orang dan proses pengambilan keputusan.

Pergeseran yang signifikan diperlukan dalam pola pikir manajemen, staf, dan pemangku kepentingan lainnya dan manajemen perubahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai pergeseran ini dan memastikan transisi yang sukses secara keseluruhan. Proses perubahan manajemen harus disesuaikan, termasuk untuk pelatihan, manajemen proyek, kampanye kesadaran dan

perubahan organisasi. Perubahan manajemen harus mengambil pendekatan holistik mempertimbangkan seluruh organisasi dan tidak hanya berfokus pada bagian akuntansi.

d. Biaya Konversi

Transisi ke standar berbasis akrual mungkin memerlukan investasi yang signifikan, yaitu di teknologi informasi dan pengembangan kapasitas. Namun, manfaat dalam hal peningkatan transparansi dan perbaikan pengelolaan keuangan publik harus jelas lebih besar daripada biaya.

e. Dampak yang Diharapkan Dari Angka yang Dilaporkan

Dampak yang diharapkan dari angka yang dilaporkan diidentifikasi sebagai penghalang utama hanya 18% dari responden. Perhatian terutama berkaitan dengan pelaporan tingkat kewajiban pemerintah yang sebenarnya, termasuk kewajiban pensiun dan kewajiban yang timbul dari berbagai transaksi keuangan.

2.1.3. Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

“Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi akuntansi perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan” (Waluyo, 2014).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan kepatuhan perpajakan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

2.1.3.2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

1. Pembukuan

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah :

- a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghasilan netto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan dan penghasilan netto yang merupakan objek pajak.

Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan antara lain:

- a) Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT.
- b) Mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak.
- c) Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Persyaratan Pembukuan akuntansi pajak antara lain:

- a) Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya
- b) Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
- c) Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
- d) Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan ijin Menteri Keuangan.
- e) Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun.

Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya penghasilan netonya dihitung berdasar norma perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.

2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

Perbedaan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi komersial antara lain:

1. Tujuan: Akuntansi komersial menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Sedangkan akuntansi pajak

menyajikan laporan keuangan & informasi lain (*tax compliance*) kepada administrasi pajak. Undang-undang Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi.

2. Laporan Keuangan: Laporan keuangan pajak adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan. Sedangkan Laporan keuangan komersial menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti :
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba-Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Modal;
 - 4) Laporan catatan atas laporan keuangan;
 - 5) Laporan kas
3. Koreksi keuangan: Suandy (2014) mengatakan koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi

suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Terdapat dua perbedaan dalam koreksi fiskal yaitu:

- (1) Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena perhitungan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

4. Lembaga Pembuat Ketentuan: Akuntansi pajak menggunakan metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : (a) Undang-Undang Perpajakan; (b) Peraturan pemerintah; (c) Keputusan Presiden; (d) Keputusan Menteri; (e) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

3. Konsep Dasar dan Tujuan Akuntansi Perpajakan

Tujuan Kebijakan Perpajakan :

- a. Aspek Alokasi

Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan pada mekanisme pasar).

- b. Aspek Distribusi

Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran kepemilikan atau penguasaan faktor-faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan.

c. Aspek Stabilisasi

dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi.

Konsep dasar laporan keuangan komersial terdiri dari :

a. Dasar akrual (*accrual basis*)

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar atau dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.

b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

c. Konservatif (*conservative*)

Konservatif yaitu konsep hati-hati, mungkin rugi yang di taksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment, contoh: penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode langsung dan metode penyisihan).

- d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

Konsep dasar laporan keuangan fiskal terdiri dari :

- a. Akruai Stelsel (*stelsel accrual*)

Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya: pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.

- b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*). Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak lainnya akan membukukan sebagai beban.

- c. Konservatif tidak digunakan.

- d. Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

2.1.3.3. Prinsip Akuntansi Perpajakan

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi: (Muljono & Wicaksono, 2009)

1) Kesatuan akuntansi

- a) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik.

Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak.

2) Kesenambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka 10 tahun.

3) Harga pertukaran yang obyektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (*cost*). Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan .

4) Konsistensi

Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip konsisten.

5) Konservatif

Prinsip ini mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

2.1.4. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang pertama dicatat pada saat suatu transaksi terjadi. Pengakuan merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan terhadap suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja (beban), dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan (Winarna, 2006).

Lebih lanjut Winarna (2006) juga menjelaskan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu transaksi atau kejadian untuk diakui yaitu apabila:

- a. Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut kemungkinan akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Transaksi atau kejadian tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

Aspek lain yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan yaitu aspek materialitas. Dalam PP 71 Tahun 2010. Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 84 menjelaskan bahwa pengakuan akuntansi merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Sedangkan definisi pengukuran menurut PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan dalam paragraf 98 yaitu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Jones & Maurice (2000) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengakuan pendapatan antara sektor swasta dengan sektor publik, pada sektor swasta cenderung mengakui pendapatan ketika suatu tagihan telah diterbitkan, sedangkan pada sektor publik umumnya, pendapatan diakui ketika kas diterima.

Definisi akuntansi akrual sesuai dengan SSAP 2 yaitu:

“Revenue and costs are accrued (that is, recognized as they are earned or incurred, not as money is received or paid), matched with one another so far as their relationship can be established or justifiably assumed, and dealt with in the profit and loss account of the periode to which they relate; provided that where the accruals concept is inconsistent with the prudence concept, the latter prevails.”

Mengacu kepada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Paragraf 95 Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa pendapatan-LO diakui ketika hak atas pendapatan tersebut timbul atau masuknya sumber daya ekonomi. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan LO menyebabkan munculnya piutang pajak dan piutang bukan pajak berasal dari pendapatan dalam Neraca, sesuai Paragraf 49 Lampiran 1.02 PSAP 01 diakui sebatas potensi piutang yang dapat ditagih sejalan dengan Paragraf 67 dan 68 Lampiran 1.02 PSAP 01 (Hoesada, 2013). Secara lengkap Paragraf 67 dan 68 dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 67) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 68) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Sedangkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdapat Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di antaranya yaitu Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*). Maksud dari prinsip tersebut yaitu transaksi atas suatu peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Dengan demikian, apabila ada suatu peraturan atau undang-undang yang bertentangan dengan prinsip akuntansi, maka mengacu kepada prinsip tersebut, akuntansi seharusnya mencatat sesuai substansinya.

Pendapatan berbasis akrual hanya diakui apabila jumlah dan waktu ketertagihan dapat diperkirakan secara andal, kemungkinan direalisasi (ketertagihan) adalah besar (*probable*). Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pendapatan diakui ketika pendapatan diterima dan dicatat sebesar penerimaan tersebut (basis kas karena alasan kepraktisan akuntansi/*expediency*).

Apabila pendapatan diakui dan dicatat ketika terjadinya penerimaan kas di KUN/KUD, maka hal tersebut merupakan penyimpangan dari standar berbasis akrual paripurna. Paragraf 109 dan 110 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur tentang pengungkapan yang memadai atas basis-basis pengukuran yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan di antaranya yaitu pengakuan atas pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, pengakuan beban dan belanja, serta penjabaran dalam mata uang asing.

IPSAS 9 dalam Suryanovi & Purwanti (2013), yang dalam pemaparan objektif-nya menyatakan bahwa: *“The primary issue in accounting for revenue is determining when to recognize revenue.”* Selanjutnya dalam paparan objektif tersebut dinyatakan pula bahwa kriteria untuk mengakui pendapatan adalah sebagai berikut: *“Revenue is recognized when it is probable that (a) future economic benefits or service potential will flow to the entity, and (b) these benefits can be measured reliably.”* Permasalahannya terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi pada titik mana suatu kejadian dianggap telah memenuhi kedua kriteria tersebut agar dapat diakui sebagai pendapatan.

Kriteria pengakuan pendapatan yaitu sebagai berikut “*They cannot recognized until they are both measurable and available to finance expenditures of fiscal policy.*” Kutipan dari GASB terkait pengakuan pendapatan pajak oleh pemerintah sebagai berikut “*Governments should recognize the taxes as revenue during the period in which the income is earned*” (Granof & Khumawala., 2013).

Mulyana (2011) menuliskan permasalahan-permasalahan krusial dalam penyusunan kebijakan akuntansi atas penerapan akuntansi berbasis akrual. Permasalahan krusial tersebut di antaranya adalah atas kriteria pengakuan pendapatan pajak. Kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah atas ketepatan waktu dan keandalan informasi yang diperoleh atas pajak yang seharusnya diakui pemerintah khususnya atas pajak yang metode pemungutannya *self assessment* (Wajib Pajak menghitung sendiri kewajibannya).

Hak Negara atas pajak yang dipungut menjadi belum final karena Wajib Pajak masih memungkinkan untuk mengajukan restitusi. Standar akuntansi pemerintah harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan pajak. Contohnya seperti yang diterapkan oleh *State and Local Governments* di Amerika, pendapatan diakui jika terpenuhinya kriteria *measurable* dan *available*.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka teoritis merupakan suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat yang ingin diuji atau dianalisis melalui penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhiana Wahyu Saputro (2010) melakukan penelitian atas kesiapan implementasi akuntansi akrual di Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum telah didukung oleh kebijakan managerial dan organisasional namun belum didukung oleh kebijakan pada tingkat teknis pelaksanaan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Raflika Septarina Mangoloi (2012) dalam penelitian terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum siap sepenuhnya dalam penerapan berbasis akrual.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gani Dalimunthe (2016) mengenai analisis basis akuntansi pendapatan pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak. Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa basis akuntansi yang paling tepat digunakan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan pajak penghasilan adalah basis akuntansi akrual modifikasi (*modified accrual*).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) mengenai budaya organisasi terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi.. Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi. Budaya organisasi memberikan pengaruh sebesar 27,4% terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi. Artinya 27,4% kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi disebabkan atau dapat dijelaskan oleh Budaya organisasi yang kuat. Semakin kuat budaya organisasi maka kesuksesan penerapan system informasi akuntansi keuangan daerah dapat tercapai.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanum, Rukmini, & Hasibuan, (2022), mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019.

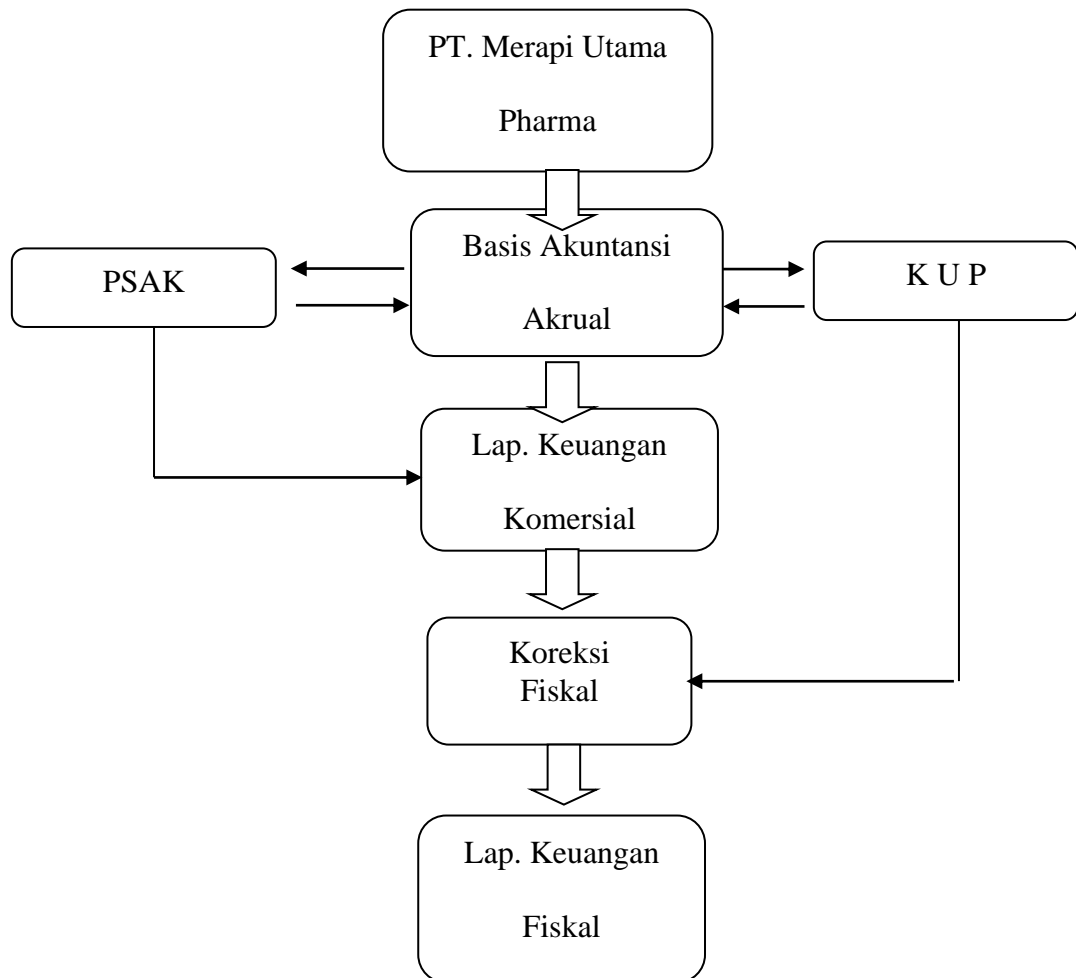
PT. Merapi Utama Pharma Medan termasuk pedagang besar Farmasi yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, cairan infuse dan peralatanya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut Prinsipal ke rumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini market. Dalam rangka menyajikan laporan keuangan wajib menyelenggarakan proses pembukuan dengan menerapkan basis akuntansi akrual yang berpedoman pada PSAK yang berlaku. Disisi lain bahwa PT. Merapi Utama Pharma Medan sebagai Wajib Pajak juga memiliki kewajiban perpajakan dengan menerapkan akuntansi perpajakan mengacu pada Ketentuan Umum Perpajakan (K U P).

Untuk kepentingan perpajakan, terdapat perbedaan pengakuan atas beberapa biaya yang diakui sesuai PSAK sebagai pedoman standar dalam penerapan sistem akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan komersial, namun tidak diakui menurut Akuntansi Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

Akibatnya terjadi Koreksi (Koreksi Fiskal) atas beberapa unsur biaya yang tidak diakui tersebut dan terhadap biaya yang tidak diakui tersebut dilakukan

penyesuaian dengan menerapkan akuntansi perpajakan mengacu pada Ketentuan Umum Perpajakan. Hasil koreksi fiskal akan menyajikan Laporan Keuangan Fiskal sebagai dasar perhitungan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.

Gambaran kerangka berpikir konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Merapi Utama Pharma Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi berbasis akrual berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan”.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Menurut Arikunto (2019) “variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.

Definisi Operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variable variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan

faktor-faktor lainnya. Analisis akuntansi perpajakan pada perusahaan yaitu melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan akuntansi pajak perusahaan.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :

1. Akuntansi Berbasis Akrua

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat dan dilaporkan ketika terjadi, terlepas dari kapan transaksi kas terjadi. International Federation of Accountants (2011) dalam *Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities* mengatakan akuntansi akrual memberikan informasi tentang posisi keuangan secara keseluruhan dan ketersediaan atas aset dan kewajiban sebuah entitas.

2. Akuntansi perpajakan

Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menyajikan informasi perpajakan kepada administrasi pajak. Karena menyangkut dengan fiskus, maka akuntansi perpajakan, baik metode, prosedur, dan teknik pencatatan dan penilaiannya harus selalu berkaitan dengan hukum pajak.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah PT. Merapi Utama Pharma Medan yang berlokasi di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan

Sunggal, Medan 20138. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan April 2023 sampai September 2023 dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	Apri 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan (prariset)	■																							
2	Penyusunan proposal		■	■																					
3	Pembimbingan Proposal			■	■	■	■																		
4	Seminar Proposal																								
5	Penyempurnaan Proposal																								
6	Pengumpulan Data																								
7	Pengolahan dan analisis data																								
8	Penyusunan skripsi (laporan penelitian)																								
9	Pembimbingan Skripsi																								
10	Sidang meja hijau																								
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan jurnal																								

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data kuantitatif yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka
- Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya analisis data, dan diskusi terfokus.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik observasi, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.
- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu laporan keuangan PT. Merapi Utama Pharma Medan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah :

1. Observasi (Pengamatan) adalah peninjauan langsung pada objek penelitian dengan maksud mencatat data-data yang ada di lapangan tentang penerapan Standar Akuntansi Indonesia dan penerapan perpajakan.
2. Wawancara (Interview) adalah mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi adalah memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk surat, catatan, data perusahaan, laporan keuangan, dan sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

Metode Analisis Deskriptif : data dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian ditafsirkan sehingga dapat menjadikan kesimpulan umum dan dibandingkan dengan teori agar dapat diketahui perbedaan diantara keduanya, dari perbandingan teori dan hasil laporan penelitian tersebut, diambil kesimpulan dan saran. Dari hasil perbandingan ini, maka diajukan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya bagi perusahaan dimasa mendatang.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang di peroleh
2. Menganalisis data yang diperoleh
3. Menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan observasi ke perusahaan.
5. Menganalisis penyebab adanya perbedaan pengakuan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
6. Menarik Kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Merapi Utama Pharma

PT. Merapi Utama Pharma didirikan sejak tahun 1973, yaitu sejak diubahnya status perusahaan dari CV. Merapi Trading menjadi PT. Merapi Utama Pharma. PT. Merapi Utama Pharma adalah termasuk pedagang besar farmasi yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, cairan infuse dan peralatannya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut Principal kerumah sakit, apotik, outlat, supermarket maupun mini market.

PT. Merapi Utama Pharma termasuk dalam kategori pedagang besar farmasi karena bergerak di bidang pendistribusian obat-obat dan alat-alat kesehatan dan mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan. Ada sekitar 30 perusahaan (*principal*) pemroduksi alat kesehatan dan obatobatan yang bekerjaama dengan PT. Merapi Utama Pharma. Ketigapuluh Principal tersebut adalah :

1. Otsuka Indonesia
2. Samco Farma
3. Abbot Indonesia
4. Graha Farma
5. Widatra Bhakti
6. Metz Farma
7. Meiji Indonesia
8. Fuji X-Ray
9. Cendo
10. Indofarma

11. Bernofarm
12. Paramount Bed Indonesia
13. HOE Pharmaceutical
14. CIB Sanquin
15. Kimia Farma
16. Azlindo Anugerah Lestari
17. Johnson & Johnson
18. PPI (Daichi)
19. SNA Menika
20. Pharma Life
21. Synthes
22. Wooshin Medics
23. Amerta Indah Otsuka
24. Mitramas Prestasi
25. Ahmadaris
26. Ekaswara Sentra Asia
27. Bio Farma
28. Hisamitsu Pharma Indonesia
29. Kyowa Hakka
30. Medikon Prima Laboratories

PT. Merapi Utama Pharma pusat terletak di Jl. Cilosari No 25 Jakarta yang memiliki 27 cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, dan salah satu cabangnya ada di kota Medan yang terletak di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138.

4.1.2. Visi dan Misi PT. Merapi Utama Pharma

Visi

Menjadi perusahaan farmasi dan distribusi kesehatan dipercaya dengan memberikan layanan terbaik dan nilai tambah bagi kesehatan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Misi

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai aset yang paling berharga perusahaan.

Mendistribusikan produk farmasi dan kesehatan yang berkualitas terus menerus untuk pelanggan.

Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui manajemen yang efektif dan efisien.

4.1.3. Peran dan Fungsi PT. Merapi Utama Pharma

PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan ini berbentuk Badan Usaha Perseroan yaitu PT (Perseroan Terbatas) kategori PBF (Pedagang Besar Farmasi). Izin pendiriannya ialah : 31027 / PBF/ CAB-18 / X / 98, yang disahkan pada tanggal 7 Nopember 1998 bulan tambahan berita Negara republik Indonesia.

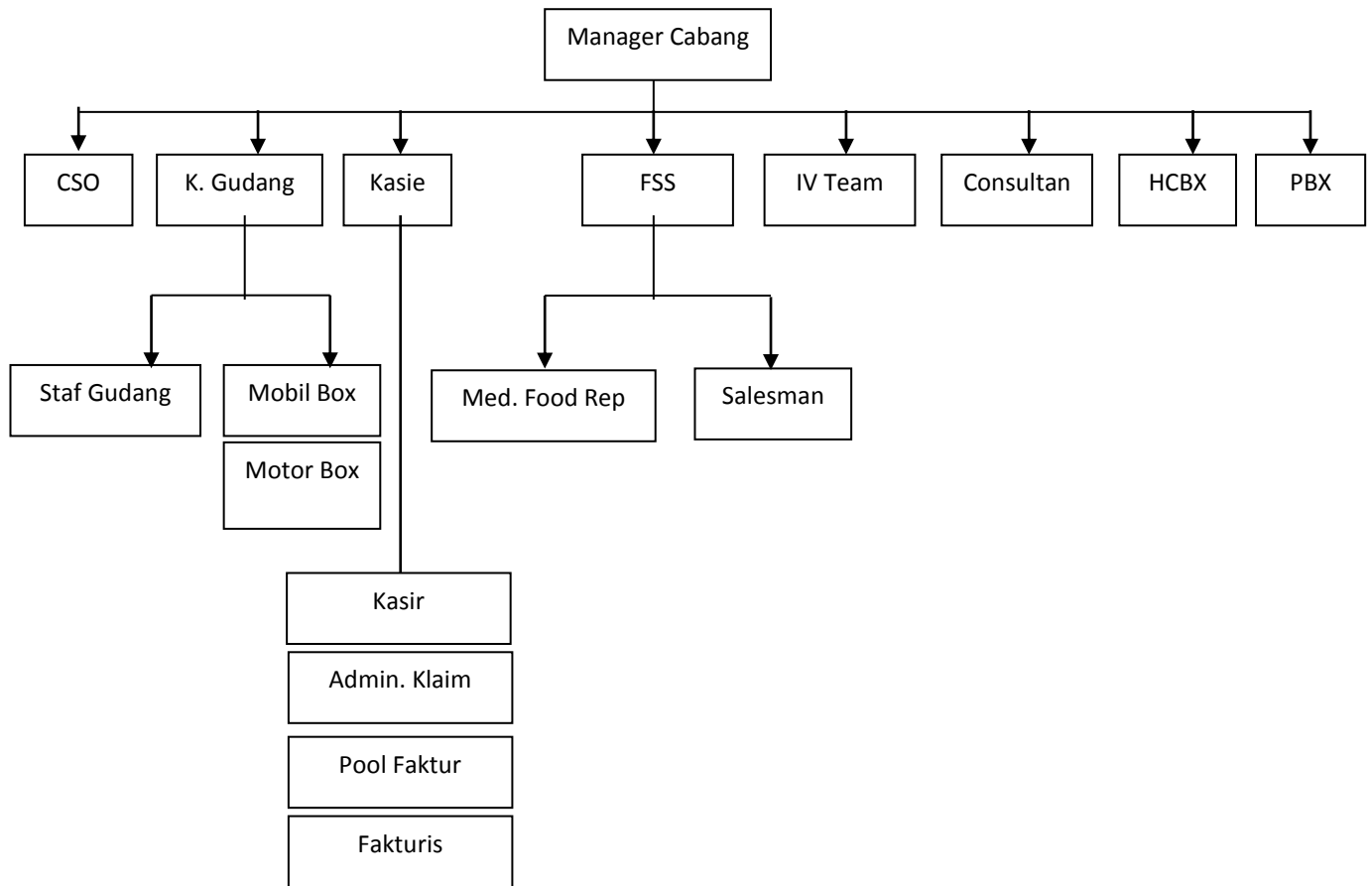
PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan bertugas untuk membantu PT Merapi Utama Pharma pusat mendistribusikan produk-produk *principal colega* (yang tersebut di atas) ke wilayah Medan dan sekitarnya.

Permasalahan kerjasama dengan *Principal* mana dan bagaimana caranya adalah tugas dari PT. Merapi Utama Pharma pusat baik secara langsung maupun melalui rekomendasi dari PT. Merapi Utama Pharma cabang. Sehingga semua sistem yang ada di PT. Merapi Utama Pharma cabang semuanya terpusat pada PT. Merapi Utama Pharma Jakarta.

4.1.4. Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma Medan

Struktur organisasi yang ada di PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan adalah bentuk organisasi lini (garis), yaitu kepala Cabang (Manager Cabang)

membawahi langsung setiap bagian atau unit yang ada, sedangkan unit-unit tersebut membawahi sub-sub unit. Lihat pada gambar 4.1.



Sumber: PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan (2023)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan

4.1.5. Personalia dan Ketenagakerjaan

Karyawan PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan secara keseluruhan, adalah sebagai berikut (berdasarkan jabatan). Data jumlah Karyawan PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan.

Tabel 4.1. Jumlah karyawan PT. Merapi Utama Pharma Cabang Medan

Jabatan	Pendidikan Terakhir		Jumlah
	Sarjana/D3	SLTA/Sederajat	
Manajer Cabang	1 orang		1 orang
CSO/AA.P	1 orang		1 orang
Kepala Gudang	1 orang		1 orang
Kasie	1 orang		1 orang
FSS	1 orang		1 orang
1 V Team	3 orang		3 orang
ME Consultan	1 orang		1 orang
HCBX	1 orang		1 orang
PBX	1 orang		1 orang
Staf Gudang	3 orang		1 orang
Mobil Box	-	5 orang	5 orang
Motor Box	-	3 orang	3 orang
Kasir	1 orang		1 orang
Administrasi Klaim	1 orang		1 orang
Fakturis	1 orang		1 orang

Pool Faktur	1 orang		1 orang
Medical Food	1 orang		1 orang
Saleman	7 orang	4 orang	11 orang
Jumlah Total			36 orang

Sumber : PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan (2023)

4.2. Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma

4.2.1. Mekanisme Pencatatan Pendapatan Pajak Berbasis Akrua

Secara akuntansi, transaksi yang terkait dengan Pendapatan Pajak berbasis akrual adalah Pendapatan Pajak, Piutang Pajak dan Penerimaan Kas. Penerimaan Kas yang diperoleh Negara dari pembayaran pajak secara langsung masuk ke Rekening Kas Umum Negara sehingga tidak dicatat dalam laporan keuangan. Sehingga yang dicatat dalam laporan keuangan adalah pendapatan pajak dan piutang pajak. Pendapatan pajak disajikan dalam Laporan Operasional, sedangkan piutang pajak disajikan dalam Neraca.

Perusahaan wajib menyeleggarakan pembukuan dan membuat laporan keuangan terutama laporan laba rugi. Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Berikut adalah data perhitungan laba rugi PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 - 2021 :

Tabel 4.2. Perhitungan Laba Rugi Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

Catatan/ Notes	2 0 2 2	2 0 2 1
-------------------	---------	---------

PENJUALAN BERSIH	43,51	43.436.966.667	14.327.964.032
BEBAN POKOK PENJUALAN	44,51	(35.063.953.691)	(9.213.096.732)
LABA KOTOR		8.373.012.976	5.114.867.300
Beban penjualan	45	(2.498.969.484)	(2.331.337.782)
Beban umum dan administrasi	46	(2.308.392.490)	(1.796.637.805)
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans	47	(257.100.567)	(158.002.185)
LABA USAHA		3.308.550.435	828.889.528
Penghasilan lainnya, bersih	48	99.809.948	272.996.585
Pendapatan keuangan	49	73.629.418	30.690.264
Beban keuangan	50	(826.727.030)	(725.285.474)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.655.262.771	407.290.903
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	12c	(1.180.099.747)	(179.660.652)
Pajak tangguhan	12c,12e	456.125.575	61.554.927
Total beban pajak penghasilan		(723.974.172)	(118.105.725)
LABA TAHUN BERJALAN		1.931.288.599	289.185.178

4.2.2. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam artian akuntansinya rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan

penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan/ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia.

Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dimana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan penghasilan fiskal adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021
(dalam ribuan)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	2.655.262.771	407.290.903
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(401.656.608)	(91.440.700)
Eliminasi	237.603.533	86.436.925
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>2.491.209.696</u>	<u>402.287.128</u>
Beda waktu:		
Beban imbalan pasca kerja	60.591.402	48.255.435

Pembayaran manfaat	(25.166.721)	(15.378.709)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	57.023.717	11.949.756
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	(19.562.785)	(2.344.631)
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	35.940.504	9.708.004
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(5.120.278)	(6.755.656)
Liabilitas kontrak	2.005.523.672	–
Beban tangguhan penugasan	(6.317.631)	–
Total beda waktu	<u>2.102.911.880</u>	<u>45.434.199</u>
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	195.262.210	44.425.846
Pendapatan deviden	(6.351.759)	–
Penghasilan dikenakan pajak final	(70.983.619)	(14.304.130)
Total beda tetap	<u>117.926.832</u>	<u>30.121.716</u>
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	<u>4.712.048.408</u>	<u>477.843.043</u>
Beban pajak kini	1.036.650.650	105.125.469
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 22	35.319.430	26.464.382
Pasal 23	131.796	173.466
Pasal 25	<u>107.229.997</u>	<u>57.053.745</u>
Total	<u>142.681.223</u>	<u>83.691.593</u>
Taksiran kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>893.969.427</u>	<u>21.433.876</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba-rugi konsolidasian	2.655.262.771	407.290.903
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(401.656.608)	(91.440.700)
Eliminasi	237.603.533	86.436.925
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>2.491.209.696</u>	<u>402.287.128</u>
Manfaat pajak sesuai tarif pajak efektif yang berlaku	548.066.133	88.503.168
Pengaruh pajak atas beban/ (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	42.957.686	9.773.686
Pendapatan deviden	(1.397.387)	-
Penghasilan dikenakan pajak final	(15.616.396)	(3.146.908)
Penyesuaian pajak tangguhan Perusahaan	625.075	(48.009.144)
Beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>574.635.111</u>	<u>47.120.802</u>
Entitas Anak:		
Pajak kini	122.223.583	74.535.183
Penyesuaian tahun lalu	21.225.514	-
Pajak tangguhan	5.889.964	(3.550.260)
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u><u>723.974.172</u></u>	<u><u>118.105.725</u></u>

Berdasarkan data PT. Merapi Utama Pharma diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal dan komersial berbeda. Sehingga menimbulkan penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih besar menurut fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat pengurangan biaya-biaya yang dilakukan oleh fiskal. Pengurangan biaya tersebut bisa terjadi karena perusahaan belum menerapkan

peraturan perpajakan yang berlaku sehingga berdampak kepada jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar.

4.3 Pembahasan

Dalam artian akuntansinya rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan/ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia.

Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dimana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan.

Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya yaitu beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui

oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut UU perpajakan.

Laba sebelum pajak disebut juga dengan *Earning Before Tax* (EBIT) merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Sedangkan, laba sesudah pajak adalah laba yang diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Selain dua jenis laba tersebut, ada 2 jenis laba lainnya yang juga penting dalam penyusunan laporan laba rugi yaitu laba kotor penjualan dan laba operasional. Laba kotor penjualan merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Laba kotor penjualan juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan, laba bersih operasional merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan, penyebab koreksi fiskal beda tetap terjadi karena munculnya deviden. Berdasarkan akuntansi komersial disebut penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh tidak termasuk penghasilan. Sedangkan berdasarkan akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final seperti penghasilan berupa: (1) Hadiah undian (2) Pengalihan harta berupa tanah

dan/atau bangunan (3) Penyewaan tanah dan/atau bangunan (4) Jasa konstruksi (5) Bunga deposito dan tabungan lainnya

Berdasarkan akuntansi komersial pengakuan biaya atau beban koreksi termasuk ke dalam biaya, sedangkan Undang-undang PPh mengatakan sebaliknya dan tidak mengurangi penghasilan bruto seperti biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan: (1) yang tidak termasuk objek pajak (2) yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan (3) yang dikenakan pajaknya bersifat final. Selain itu juga berupa: (1) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk barang bukan uang. (2) Sanksi administrasi seperti denda, bunga, kenaikan serta sanksi pidana ber yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (3) Pajak penghasilan (4) Biaya lain yang menurut UU PPh tidak dapat dibebankan.

Tabel 4.4. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	195.262.210	44.425.846
Pendapatan deviden	(6.351.759)	-
Penghasilan dikenakan pajak final	(70.983.619)	(14.304.130)
Total beda tetap	<u>117.926.832</u>	<u>30.121.716</u>

Dari tabel diatas menunjukkan koreksi fiskal beda tetap terjadi karena munculnya deviden di tahun 2022. Perlakuan dari koreksi fiskal sendiri tercantum dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tentang PPh Koreksi fiskal yang dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan negatif. Koreksi fiskal

positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Sebaliknya koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PhKP. Dari tabel di atas terjadi koreksi fiskal negatif di tahun 2022.

Beda waktu terjadi faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari satu tahun, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus. Perbedaan ini menyebabkan adanya pencatatan atas kewajiban pajak yang ditangguhkan yang sementara ini dapat dikurangkan dan dapat menyebabkan pencatatan pada aktiva pajak yang ditangguhkan itu sendiri. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda.

Beberapa contoh perbedaan dalam pengakuan sehingga dibutuhkan rekonsiliasi fiskal dikarenakan adanya perbedaan waktu menurut undang-undang perpajakan: (1) Metode penyusutan yang boleh digunakan hanya metode garis lurus dan saldo menurun. (2) Metode penilaian persediaan yang boleh digunakan hanya metode rata-rata FIFO. (3) Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu berdasarkan undang-undang PPh.

Tabel 4.5. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beda waktu:		
Beban imbalan pasca kerja	60.591.402	48.255.435
Pembayaran manfaat Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	(25.166.721)	(15.378.709)
	57.023.717	11.949.756

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	(19.562.785)	(2.344.631)
Cadangan kerugian penurunan nilai Persediaan	35.940.504	9.708.004
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(5.120.278)	(6.755.656)
Liabilitas kontrak	2.005.523.672	–
Beban tanggungan Penugasan	(6.317.631)	–
Total beda waktu	<u>2.102.911.880</u>	<u>45.434.199</u>

Dari tabel diatas menunjukkan koreksi fiskal beda waktu terjadi karena adanya beban imbalan pasca kerja, pembayaran manfaat, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain, pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain, cadangan kerugian penurunan nilai persediaan, pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan, liabilitas kontak dan beban tanggungan penugasan. Koreksi fiskal positif terjadi karena adanya beban imbalan pasca kerja, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain, cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan liabilitas kontak. Koreksi fiskal negatif terjadi karena adanya pembayaran manfaat, pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan, pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan beban tanggungan penugasan.

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Sedangkan pajak tanggungan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan, apabila dilihat dari aspek perpajakan.

Tabel 4.6. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

		2022	2021
MANFAAT (BEBAN)			
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	12c	(1.180.099.747)	(179.660.652)
Pajak tangguhan	12c,12e	456.125.575	61.554.927
Total beban pajak penghasilan		<u>(723.974.172)</u>	<u>(118.105.725)</u>

Tabel 4.7. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beban pajak kini	1.036.650.650	105.125.469
Penyesuaian pajak tangguhan Perusahaan	<u>625.075</u>	<u>(48.009.144)</u>

Dari tabel di atas terjadi perbedaan perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan antara laporan keuangan komersial dan rekonsiliasi fiskal.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku.
2. Adanya laporan rekonsiliasi fiskal karena perbedaan antara pengakuan pendapatan dan biaya dalam akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan.
3. Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya yaitu beda tetap dan beda waktu. Laporan rekonsiliasi fiskal terjadi karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.
4. Adanya perbedaan penghasilan kena pajak (PKP) disebabkan karena adanya biaya yang tidak diakui sebagai biaya dalam akuntansi menurut pajak tetapi diakui menurut akuntansi komersial, dimana biaya tersebut dapat memperkecil penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perpajakan :

1. Dalam menerapkan akuntansi perpajakan sebaiknya perusahaan berpedoman kuat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Karena dalam undang-undang tersebut sudah diatur secara rinci tentang ketentuan dan ketepatan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik sangat berguna bagi sebuah perusahaan yaitu meliputi :
 - a. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan
 - b. Menyajikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa mendatang
 - c. Mampu menerapkan perlakuan atau perilaku akuntansi atas kejadian perpajakan
 - d. Sebagai bahan evaluasi perusahaan
 - e. Meningkatkan sadar pajak bagi wajib pajak

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Pada saat proses pengambilan data ke perusahaan, karyawan yang memegang data tidak hadir sehingga perlu beberapa kali untuk datang ke perusahaan.

2. Pada saat proses wawancara, waktu yang begitu singkat sehingga tidak bisa mengkaji informasi perusahaan lebih dalam lagi dan beberapa data perusahaan yang tertutup untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. H., Radistya, D., & Murti, K. D. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual. *Seminar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003). *Accrual Budgeting and Accounting in Government and Its Relevance for Developing Member Countries*. Philippines: Asian Development Bank.
- Granof, E. M., & Khumawala., B. S. (2013). *Government and Not-for-Profit Accounting, Concepts and Practices* (6th ed.). New York: Wiley.
- Hanum, Z., Rukmini, & Hasibuan, J. S. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 212–219.
- Hassan, M. M. (2013). Debates on accrual accounting in the public sector: A discrepancy between practitioners and academicians. *Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference-APIRA Kobe*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- International Federation of Accountants. (2011). *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities. Study 14*. New York.
- Jones, R., & Maurice, P. (2000). *Public Sector Accounting* (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
- Lumingkewas, V. A. (2013). Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 199–206.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan* (1st ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyana, B. (2011). *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD*. Jakarta: UNS.
- Mustofa, H. (2008). *Basis Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Parbendaharaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Price Waterhouse Cooper. (2013). *Towards A New Era in Government Accounting and Reporting*.
- Rama, D. V., & Jones, F. L. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Sari, E. N. (2018). *Budaya Organisasi dan Kesuksesan Penerapan Sistem*

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 3(3). Retrieved from <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/07/33.978-623-90018-0-3.pdf>

Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta: PT. Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suryanovi, S., & Purwanti, D. (2013). *Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan badan Basis Akrua "Formulasi Dengan Menggunakan Model Statistik*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.

Tickell, G. (2010). Cash To Accrual Accounting: One Nations Dilemma. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(11), 71–78. <https://doi.org/10.19030/iber.v9i11.32>

Triharta, A. B. (2013). *Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrua dengan Entri Berpasangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

Winarna, J. (2006). *Dasar Akuntansi Pemerintahan. Tinjauan Kritis Implementasi SAP*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Wynne, A. (2007). Is the move to accrual based accounting a real priority for public sector accounting? *International Journal on Governmental Financial Management*, (September), 25–38.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION**

As of December 31, 2021

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4,51,54,55	7.559.798.084	4.601.934.982	Cash and cash equivalent
Setoran jaminan	5,55	-	2.372.500	Guarantee deposit
Dana yang dibatasi penggunaannya	6,51,55	61.457.732	-	Restricted time deposit
Piutang usaha - neto	7,51,54,55	3.818.159.386	2.290.344.584	Trade receivables - net
Bagian jangka pendek piutang lain-lain - neto	8,51,55	262.920.950	259.338.191	Current portion of other receivables - net
Persediaan - neto	9	8.696.055.430	4.479.868.264	Inventories - net
Uang muka pembelian	10	646.067.651	2.610.246.780	Advances for purchases
Biaya dibayar dimuka	11	170.187.413	137.647.946	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	12a	698.490.403	639.476.967	Prepaid taxes
Aset kontrak	13,55	328.719.261	196.393	Contract assets
Aset pengembalian dana	14	12.848.513	6.157.565	Right of return assets
Total aset lancar		<u>22.254.704.823</u>	<u>15.027.584.172</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Bagian jangka panjang piutang lain-lain	8,55	6.395.722	-	Non-current portion of other receivables
Aset pajak tangguhan	12e	743.072.740	223.034.904	Deferred tax asset
Investasi pada entitas asosiasi	15	1.215.177	1.115.516	Investment in associate
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	16	166.165.767	166.165.767	Financial asset at fair value through other comprehensive income
Aset tetap	17	15.348.795.435	15.285.847.624	Property, plant and equipments
Aset hak guna	18	471.540.436	422.298.324	Right of use assets
Properti investasi	19	1.073.727.001	1.013.636.001	Investment property
Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan	20	2.086.525	2.212.351	Abandoned non-current assets
Aset tidak lancar atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	21	6.858.958	-	Non-current assets of disposal group classified as held for sale
Aset tidak berwujud	22	299.268.832	248.280.171	Intangible assets
Aset agrikultur dan pengembangan	23	3.757.151	4.456.666	Agrucultural and development assets
Aset tidak lancar lainnya	24	66.589.197	298.046.669	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		<u>18.189.472.941</u>	<u>17.665.093.993</u>	Total non-current assets
TOTAL ASET		<u>40.444.177.764</u>	<u>32.692.678.165</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION (Continued)**
As of December 31, 2021
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	25a,51,53b,55	3.756.954.831	7.035.436.030	Short-term bank loan
Utang usaha	26,51,54,55	2.438.268.938	2.083.112.564	Account payables
Utang lain-lain	27,55	331.978.002	132.037.973	Other payables
Utang pajak	12b	1.213.031.050	220.431.248	Tax payables
Beban yang masih harus dibayar	28,55	186.791.573	224.290.858	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29,55	503.477.790	167.761.757	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas kontrak	30	6.734.274.492	646.281.016	Contract liabilities
Liabilitas pengembalian dana	31	39.029.537	7.784.828	Refund liabilities
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: <i>Medium Term Notes</i>	32,51,53b,55	500.000.000	1.050.000.000	Current portion of long term liabilities: <i>Medium Term Notes</i>
Utang bank jangka panjang	25b,51,53b,55	700.037.148	272.205.123	Long term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	33,51,53b,55	16.163.122	14.831.967	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	35,51,53b,55	25.437.165	8.841.568	Lease liabilities
Pendapatan hibah yang ditangguhkan	34	525.949.522	-	Deferred grant revenue
Total liabilitas jangka pendek		<u>16.971.393.170</u>	<u>11.863.014.932</u>	Total current liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES**

**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION (Continued)**

As of December 31, 2021

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 2 1	2 0 2 0	
LIABILITAS				NON-CURRENT
JANGKA PANJANG				LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: <i>Medium Term Notes</i>	32,51,53b,55	-	500.000.000	<i>Long-term liabilities, net of current portion: Medium Term Notes</i>
Utang bank jangka panjang	25b,51,53b,55	3.748.821.923	2.423.929.819	<i>Long term bank loan</i>
Utang pembiayaan konsumen	33,51,53b,55	3.395.339	7.919.039	<i>Consumer financing payables</i>
Liabilitas sewa	35,51,53b,55	68.924.505	28.681.351	<i>Lease liabilities</i>
Pendapatan hibah yang ditangguhkan	34	485.446.122	511.172.655	<i>Deferred grant revenue</i>
Liabilitas pajak tangguhan	12e	414.646.551	438.130.869	<i>Deferred tax liabilities</i>
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	36	1.370.083.227	1.078.484.231	<i>Long-term employee benefits liabilities</i>
		<u>6.091.317.667</u>	<u>4.988.317.964</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Total liabilitas jangka panjang		<u>6.091.317.667</u>	<u>4.988.317.964</u>	
TOTAL LIABILITAS		<u>23.062.710.837</u>	<u>16.851.332.896</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL
POSITION (Continued)**

As of December 31, 2021

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar –				Authorized capital –
61.000.000 (angka penuh)				61,000,000 (full amount)
saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham;				shares as of December 31, 2021 and 2020 with par value at Rp 1,000,000 (full amount), per share respectively;
Modal ditempatkan dan disetor penuh –				Issued and fully paid up –
17.479.821 (angka penuh) dan 15.479.821 (angka penuh) lembar saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	37	17.479.821.000	15.479.821.000	17,479,821 (full amount) and 15,479,821 (full amount) shares as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Modal saham ditempatkan	38	–	2.000.000.000	Subscribed capital
Tambahan modal disetor	39	(6.370.720.341)	(6.370.720.341)	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	40	1.681.600.095	1.961.025.473	Other equity component
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	41a	1.409.328.696	1.201.417.651	Appropriated
Belum dicadangkan	41b	1.920.779.386	284.631.045	Unappropriated
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		<u>16.120.808.836</u>	<u>14.556.174.828</u>	Total equity attributable to the owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	42	1.260.658.091	1.285.170.441	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		<u>17.381.466.927</u>	<u>15.841.345.269</u>	TOTAL EQUITY
TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS		<u>40.444.177.764</u>	<u>32.692.678.165</u>	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(Lanjutan)

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

(Continued)

**For the years ended
December 31, 2021 and 2020**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(395.383.400)	(42.757.953)	<i>Remeasurement on defined benefit program</i>
Selisih revaluasi		(1.799.309)	(185.143.699)	<i>Revaluation surplus</i>
Selisih penilaian investasi saham		-	(18.416.000)	<i>Reserve for changes of fair value of financial assets</i>
Pajak penghasilan terkait		87.396.579	123.622.926	<i>Related income tax</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will be reclassified to profit or loss:</i>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		6.515.549	(4.092.505)	<i>Foreign currency translation adjustment</i>
Total rugi komprehensif lain		<u>(303.270.581)</u>	<u>(126.787.231)</u>	<i>Total other comprehensive loss</i>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u>1.628.018.018</u>	<u>162.397.947</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		1.920.779.386	284.631.045	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		10.509.213	4.554.133	<i>Non-controlling interest</i>
Total		<u>1.931.288.599</u>	<u>289.185.178</u>	<i>Total</i>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		1.641.354.008	169.765.488	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	42	(13.335.990)	(7.367.541)	<i>Non-controlling interest</i>
Total		<u>1.628.018.018</u>	<u>162.397.947</u>	<i>Total</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Ekuitas Yang Dapat Ditransfer kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity											
	Modal saham/ Share capital	Modal saham ditempatkan/ Subscribed share capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid in capital	Modal proforma yang timbul karena penyajian kembali laporan keuangan/ Proforma capital arising from restatement of financial statement	Komponen ekuitas lain/ Other equity component	Saldo laba/ Retained earnings		Total ekuitas yang dapat distribusikan kepada Entitas Induk/ Total equity attributable to the owners of the Parent Entity	Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling interest	Total ekuitas/ Total equity/		
						Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo tanggal 31 Desember 2019	2.000.000.000	-	-	7.917.862.155	1.872.546.728	1.919.756.046	355.939.778	14.066.104.707	-	14.066.104.707	Balance as at December 31, 2019	
Penyesuaian selubung dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73	-	-	-	-	-	(3.090.218)	-	(3.090.218)	-	(3.090.218)	Adjustment in relation with adoption of SFAS 71, 72 & 73	
Saldo tanggal 1 Januari 2020	2.000.000.000	-	-	7.917.862.155	1.872.546.728	1.916.665.828	355.939.778	14.063.014.489	-	14.063.014.489	Balance as at January 1, 2020	
Pembagian laba											Profit sharing	
Dividen	41b	-	-	-	-	-	(71.187.955)	(71.187.955)	-	(71.187.955)	Dividend distribution	
Cadangan	41a	-	-	-	-	284.751.823	(284.751.823)	-	-	-	Appropriated retained earnings	
Kapitalisasi cadangan ke setoran modal	41a	1.000.000.000	-	-	-	(1.000.000.000)	-	-	-	-	Capitalization of reserves to paid-in capital	
Perambahan modal disetor	38	-	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	Subscribed shares	
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali - inbreng	37	12.479.821.000	-	-	-	-	-	12.479.821.000	-	12.479.821.000	Paid-up capital from non-controlling interest - inbreng	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	284.631.045	284.631.045	4.554.133	289.185.178	Profit for the year	
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(114.865.557)	-	-	(114.865.557)	(11.921.674)	(126.787.231)	Other comprehensive loss	
Pembalikan proforma ekuitas dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependandi	-	-	-	(7.917.862.155)	-	-	-	(7.917.862.155)	-	(7.917.862.155)	Reversal of proforma equity arising from business combination among entities under common control	
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	39	-	(922.961.282)	-	203.344.302	-	-	(719.616.980)	1.292.537.982	572.921.002	Difference due to transaction with non-controlling interest	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependandi	39	-	(5.447.759.059)	-	-	-	-	(5.447.759.059)	-	(5.447.759.059)	Difference in value of restructuring transaction among entities under common control	
Saldo tanggal 31 Desember 2020		15.479.821.000	2.000.000.000	(6.370.720.341)	-	1.961.025.473	1.201.417.651	284.631.045	14.556.174.828	1.285.170.441	15.841.345.269	Balance as at December 31, 2020
Pembagian laba											Profit sharing	
Dividen	41b	-	-	-	-	-	(76.720.000)	(76.720.000)	(11.176.360)	(87.896.360)	Dividend distribution	
Cadangan	41a	-	-	-	-	207.911.045	(207.911.045)	-	-	-	Appropriated retained earnings	
Perambahan modal disetor	37,38	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	Subscribed shares	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1.920.779.386	1.920.779.386	10.509.213	1.931.288.599	Profit for the year	
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(279.425.378)	(279.425.378)	-	(279.425.378)	(23.845.203)	(303.270.581)	Other comprehensive loss	
Saldo tanggal 31 Desember 2021		17.479.821.000	-	(6.370.720.341)	-	1.681.600.095	1.409.328.696	1.920.779.386	16.120.808.836	1.260.658.091	17.381.466.927	Balance as at December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021 dan 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2021 and 2020**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		50.352.591.240	15.767.831.614	Receipts from customers
Pengeluaran untuk pemasok		(39.376.586.112)	(11.533.222.435)	Payments to suppliers
Pengeluaran untuk karyawan		(2.701.619.104)	(2.378.046.404)	Payments to employees
Penerimaan hibah		532.375.675	516.054.339	Grant receipt
Penerimaan bunga		69.259.090	30.492.572	Receipts from interest
Pembayaran bunga		(710.978.018)	(678.058.294)	Payments of interest
Pembayaran pajak		(321.189.786)	(330.565.634)	Payments of tax
Penerimaan pajak (restitusi)		500.463.499	277.616.879	Receipts from tax
Penerimaan dari klaim asuransi		224.122	46.795	Proceeds from insurance claims
Pembayaran beban lainnya		(1.747.783.125)	(1.652.976.948)	Payments of other expenses
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>6.596.757.481</u>	<u>19.172.484</u>	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	17	(906.134.357)	(804.917.634)	Acquisition of property, plant and equipment
Perolehan aset tidak berwujud	22	(67.530.338)	(6.968.575)	Acquisition of intangible assets
Penerimaan penjualan aset keuangan yang tersedia untuk dijual	16	-	3.565.893	Proceeds from sale of available for sale financial assets
Penerimaan penjualan aset lain-lain	24	4.502.799	1.194.856	Proceeds from sale of other assets
Penerimaan penghasilan bunga		1.992.733	1.104.999	Interest received from bank
Penerimaan dividen		8.677.910	7.490.109	Dividend receipt
Penempatan deposito berjangka		(95.000.000)	-	Placement of time deposit
Pembayaran bunga pinjaman investasi		(7.177.083)	(9.930.605)	Payments of interest - investment credit
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(1.060.668.336)</u>	<u>(808.460.957)</u>	Net cash used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MERAPI UTAMA PHARMA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERAPI UTAMA PHARMA AND
ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(Continued)
For the years ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penarikan pinjaman jangka pendek		32.070.785.555	11.675.911.338	<i>Proceeds from short-term bank loan</i>
Pembayaran pinjaman jangka pendek		(35.391.186.163)	(10.485.872.595)	<i>Payments of short-term bank loan</i>
Penerimaan pinjaman jangka panjang		2.089.561.400	850.000.000	<i>Proceeds from long-term bank loan</i>
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(744.917.862)	(157.952.370)	<i>Payments of short-term bank loan</i>
Pembayaran <i>Medium Term Note</i>		(600.000.000)	(400.000.000)	<i>Payments of short-term bank loan</i>
Pembayaran dividen tunai	41b	(76.720.000)	(71.187.955)	<i>Cash dividend paid</i>
Pembayaran pembiayaan konsumen	33,51,53b,55	(6.008.428)	(6.712.295)	<i>Payments of consumer finance payables</i>
Penanaman modal negara	38	-	2.000.000.000	<i>Share subscription receipt</i>
Pembagian dividen dari entitas anak untuk kepentingan non-pengendali		(11.174.809)	(32.322.987)	<i>Dividend distribution from subsidiaries for non-controlling interest</i>
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(2.669.660.307)</u>	<u>3.371.863.136</u>	<i>Net cash (used in) provided by financing activities</i>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2.866.428.838	2.582.574.663	<i>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas		91.434.264	(26.057.298)	<i>Effect of exchange rate differences in cash and cash equivalents</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		4.601.934.982	2.045.417.617	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		<u>7.559.798.084</u>	<u>4.601.934.982</u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 31/01/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tantry Suci Chairani
NPM : 1905170230
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Penyajian angka penerimaan pajak di KPP. Pratama Medan Kota masih menggunakan akuntansi berbasis kas yang sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010
- Rencana Judul : 1. Analisis Akuntansi Pendapatan Perpajakan Dalam Rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesti
3. Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Objek/Lokasi Penelitian : KPP. Pratama Medan Kota

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Tantry Suci Chairani)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/01/2023

Nama Mahasiswa

: Tantry Suci Chairani

NPM

: 1905170230

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Perpajakan

Tanggal Pengajuan Judul

: 31/01/2023

Nama Dosen pembimbing^{*)}

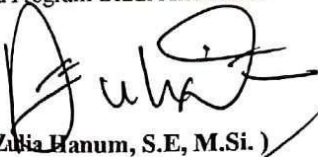
: Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (13 Februari 2023)

Judul Disetujui^{**)}

: Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrea 1
Terdapat Pendapatan Menurut Undang Undang
Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma
Medan

Medan, 12 Juli 2023

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing


(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1748/IL3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 26 Dzulhijah 1444 H
14 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Merapi Utama Pharma Medan
Jln. Tapan Nauli Pasar 1 No.5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tantry Suci Chairani
Npm : 1905170230
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Pendapatan Menurut Undang Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jantri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1750/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 08 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Tantry Suci Chairani
 N P M : 1905170230
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap
 Pendapatan Menurut Undang Undang Perpajakan Pada PT. Merapi
 Utama Pharma Medan

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Juli 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 26 Dzulhijah 1444 H
 14 Juli 2023 M


 Dekan
Dr. H. Jahuri., SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502



Tembusan :
 1. Pertinggal





Medan, 21 Juli 2023

No. : 0001/SK/HRD/MEDAN/X/2023

Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada:

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Mukhtar Basri no. 3

Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1751/11.3-AU/UMSU-05/F/2023 perihal Ijin Riset Pendahuluan, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara pada dasarnya dapat kami setujui untuk mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Tantry Suci Chairani

NPM : 1905170230

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Prodi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Pendapatan Menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Demikian surat ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

PT. Merapi Utama Pharma Cab. Medan

HRD



MERAPI UTAMA FARM







Wahyudi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
N P M
Dosen Pembimbing
Program Studi
Konsentrasi
Judul Penelitian

: TANTRY SUCI CHAIRANI
: 1905170230
: KHAIRUL ANWAR PULUNGAN,SE.,M.Si
: AKUNTANSI
: AKUNTANSI PERPAJAKAN
: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP
PENDAPATAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT.
MERAPI UTAMA PHARMA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Periksa lagi buku - Periksa identifikasi masalah		
Bab 2	- Teori tentang pendapatan akrual. - Pendapatan berdasarkan SAK.		
Bab 3	- Teknik pengumpul data kuantitatif - Defusi rumus & hasil		
Daftar Pustaka	- Harus menyeluruh.		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Observasi, wawancara dan dokumentasi		
Persetujuan Seminar Proposal	- ACE untuk seminar.		

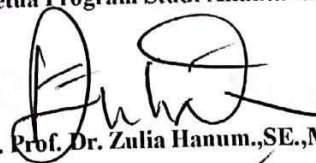
Dosen Pembimbing



(Khairul Anwar Pulungan,SE.,M.Si)

Medan, 2022

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum,SE.,M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 09 Agustus 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
 yang diorganisir oleh Panitia yang diarahkan bahwa :

: *Tantry Suci Chairani*
 : 1905170230
 : Indrapura, 15 September 2001
 : Jl. Acces Road Inalum, Brohol. Kec. Sei Suka Kab. BatuBara
 : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Pendapatan Menurut
 Undang Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Bab I
Bab I	<i>Fenomena siklusnya data. identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan</i>
Bab III
Lainnya	<i>perlu ditambah kembali buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 09 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pemanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Menyatakan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 09 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Tgl.Lahir
 Rumah
 Proposal

- : Tantry Suci Chairani
- : 1905170230
- : Indrapura, 15 September 2001
- : Jl.Acces Road Inalum, Brohol. Kec.Sei Suka Kab.BatuBara
- : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pendapatan Menurut Undang Undang Perpajakan Pada PT.Merapi Utama Pharma Medan

proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan Pembimbing : *Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si*

Medan, 09 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulha Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
 NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2492/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
 Lamp. : -
 Hal : Menyelesaikan Riset
 Medan, 20 Shafar 1445 H
 06 September 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Merapi Utama Pharma Medan
 Jln. Tapian Nauli Pasar 1 No.5 Kec. Sunggal, Kel.Medan Sunggal, Medan 20138
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Tantry Suci Chairani
 N P M : 1905170230
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Atas Pendapatan Menurut Undang Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :
 1. Pertinggal





Medan, 15 September 2023

No 0003/SK/HRD/MEDAN/IX/2023

Perihal: Menyelesaikan Riset

Kepada

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Mukhtar Basri no. 3

Medan

U p Dekan,

Sehubungan dengan surat Saudara No 2492/II 3-AU/UMSU-05/F/2023 perihal menyelesaikan riset, dengan ini kami sampaikan surat keterangan telah selesai riset untuk mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Tanry Suci Chairani

NPM : 1905170230

Fakultas : Sosial Sains

Prodi : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Pendapatan Menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Demikian surat ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami,

PT. Merapi Utama Pharma Cab Medan

HRD

MERAPI UTAMA FARMA

Wahyudi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tantry Suci Chairani
Tempat/Tanggal Lahir : Indrapura, 15 September 2001
NPM : 1905170230
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara
Alamat : Jl. Bukit Barisan 1 Gg. Bunga No.14
No. Telepon : 08989993711
E-Mail : tantrysucichairani1@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Irawan Saleh
Nama Ibu : yusmawati
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Acces Road Inalum, Brohol, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 3 Tanjung Gading
2. Tahun 2013 – 2016 : SMP Negeri 1 Tanjung Gading
3. Tahun 2016 – 2019 : SMA Negeri 1 Sei Suka
4. Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2023

Tantry Suci Chairani
NPM.1905170230